

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya).

Oleh:

Prastiyono

Alumni Program Magister Administrasi
Pascasarjana – Untag Surabaya

ABSTRACT

The Indonesia Government has commitments to organize inclusive education, that is to give the widest chance and access to all children including children with special needs to receive good quality of education dan appropriate to the need of student individual without discrimination. But on the reality, there are still lot of school-aged children with special needs haven't got chance to receive education yet. This conditions are caused by many barriers including the social conditions of the civilizations. Another barriers come from schools who organize inclusive education still unable to organize inclusive education optimally. So that these inclusive education organizer isn't yet unable to well developed at present. This research aims to analyze the implementation of inclusive education policy in Galuh Handayani School Surabaya and analyze factors that affect the implementation of inclusive education in creating quality of education in Galuh Handayani School Surabaya. This research focuses are, to observe the behavior of implementor from City Education Office and implementor school institution in socializing inclusive education policy, to observe the execution of working program from teachers in learning process in Galuh Handayani inclusive school Surabaya, to observe execution of inclusive education learning process and to observe execution of evaluation and inclusive education management monitoring. Qualitative descriptive is used to analyze datas. This research results show: first, that implementation of inclusive education in Galuh Handayani isn't optimal or well performed yet. That can be reflected from indications like: (1) not all teachers able to perform inclusive education well, (2) not all parents understand knowledges about inclusive education. Second, factors that affect the success or failure of inclusive education policy implementation are communication factor: that is socialization only held two encounters in one semester. Resources factor include: not all teachers have ability and understanding about inclusive education and fund limitation to develop inclusive education. Disposition factors include: not all teachers have good attitude and behavior in performing their tasks and functions. Also bureaucracy structure factors from implementor: well rated because they perform their tasks based on operational standard and their organization structure is lean.

Keywords: Policy Implementation and Inclusive Education

LATAR BELAKANG MASALAH

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu (Syamsu dan Juntika, 2008:4) adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang pembinaan siswa (bimbingan dan konseling). Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan konseling mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek psikososiospiritual. Karena bidang pembinaan siswa (bimbingan dan konseling) ter-

kait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal, melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya.

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan yang pokok, dimana pemerintah di setiap negara harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar seimbang bersama-sama dengan sektor pembangunan lainnya. Sebegitu pentingnya perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain karena pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang akan turut andil dalam kelancaran pembangunan nasional pada suatu negara. Karena pendidikan sangat penting maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap warga negara. Meletakkan pendidikan sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi penerima hak. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan. Dengan demikian berarti anak-anak berkebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar dan ketunaan lainnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Pengakuan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara, juga diperkuat dalam berbagai deklarasi internasional. Pada tahun 1948, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO

(1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Deklarasi tersebut diperkuat lagi dalam *Convention on The Rights of The Child* yang diselenggarakan oleh PBB (1989) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya dalam *The World Convention on Education for All di Jamtien, Thailand (1990)*, yang kemudian dikenal dengan *The Jamtio Declaration*, antara lain juga ditegaskan perlunya memperluas akses pendidikan kepada semua anak, remaja, dan dewasa, juga memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak perempuan. Deklarasi Jamtien ini diperkuat lagi dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* tahun 1994 yang secara lebih tegas menuntut agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bersifat *inklusif*, sehingga sistem pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan Inklusi merupakan Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa belum semua warga negara memperoleh layanan pendidikan. Khususnya warga negara yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mencari solusi pemecahan masalah bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara dengan tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik.

Sampai saat ini belum ada angka pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Namun, yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Data resmi Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau

78.689 anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu 318.600 anak (Direktorat PSLB, 2008). Ini artinya masih terdapat sebanyak 65,3% ABK yang masih terabaikan hak pendidikan. Kondisi di atas tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional.

Adapun filosofi yang mendasari pendidikan inklusi adalah keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik/mental maupun cerdas/bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak “normal” lainnya dalam lingkungan yang sama. Secara lebih luas, ini bisa diartikan bahwa anak-anak yang “normal” maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya, pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah (kebutuhan khusus) dan dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Di sini, mereka tidak semata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya pada konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara mendidik *disabled children* dengan maksud untuk mengantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan “*Multi-track Approach*”. Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa yang seharusnya mampu berperan sebagai pusat

sumber dalam mendukung inklusi, belum diberdayakan secara maksimal.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusif di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Seyogyanya, agar semua anak berkebutuhan khusus dapat ditampung di pendidikan inklusif. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah sekolah pendidikan inklusi dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/reguler. Selain itu pada umumnya lokasi SLB berada di ibu kota kabupaten/kota, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten saja. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Pendidikan inklusif adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman, sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Dengan demikian kehadiran pendidikan inklusif berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus. Yang pada gilirannya bahwa pendidikan inklusif merupakan strategi yang efektif bagi kesuksesan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Keuntungan dari pendidikan inklusif

semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Permasalahan tersebut di atas, sangat diperlukan kebijakan pendidikan inklusif, yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut di atas, tentang pendidikan inklusif bertujuan: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan implementasi kebijakan inklusif, oleh karena itu sangat dibutuhkan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain : (a) kebijakan hukum dan perundang-undangan, (b) sikap, pengalaman dan pengetahuan, (c) tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (d) perubahan paradigma pendidikan seperti: desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar), (e) adaptasi lingkungan, dan (f) kerja sama kemitraan yang meliputi: pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu amanat di dalam UU No. 20/2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan Pasal 15 ditegaskan bahwa “pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dapat diselenggarakan secara inklusif dan/atau berupa satuan pendidikan khusus”.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, pengertian pendidikan inklusif ditegaskan pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Seperti halnya Sekolah Galuh Handayani Surabaya, merupakan institusi pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif “satu atap” meliputi jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan College (setara D2). Sekolah Galuh Handayani adalah sekolah umum yang juga memberikan layanan pendidikan bagi berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik dan kemampuan beragam, dengan pertimbangan bahwa anak berkebutuhan khusus cenderung terabaikan. Padahal anak-anak tersebut mempunyai problem dilematis dalam menentukan tempat dimana ia harus sekolah. Apabila disekolahkan di sekolah umum ia akan mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran seperti teman-teman lainnya, bahkan sering mendapatkan ejekan, sedangkan guru tidak mempunyai waktu memfokuskan diri untuk memperhatikan mereka. Akibatnya mereka mungkin sering tidak naik kelas yang pada akhirnya menjadi *drop out*.

Berdasarkan fenomena di atas, masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini disebabkan adanya berbagai hambatan termasuk didalamnya kondisi sosial dari masyarakat. Hambatan lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyele-

nggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut.

Realitanya sebagian besar masyarakat merasa malu mempunyai anak cacat atau anak yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, sehingga mereka berupaya menyembunyikan anaknya. Dengan demikian anak tersebut tidak dapat menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Di lain pihak banyak orang tua yang belum sadar bahwa anaknya yang mempunyai kekhususan yang juga memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Karena itu, pemerintah meminta kesadaran masyarakat untuk memberi akses kepada mereka. Hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan pendidikan inklusif di Indonesia kurang berkembang dan belum bisa mewujudkan mutu pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal, diperlukan dukungan dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan *task commitment* (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah

kurang optimal. Manajemen sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar (Depdiknas 2003: 1-2).

Dalam pendidikan inklusif terdapat beberapa komponen pendidikan yang perlu dikelola dalam sekolah inklusif, yaitu: (a) Manajemen kesiswaan; (b) Manajemen kurikulum; (c) Manajemen tenaga kependidikan; (d) Manajemen sarana dan prasarana; (e) Manajemen keuangan; (f) Manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat); dan (g) Manajemen layanan khusus.

Permasalahannya yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan inklusif sekolah Galuh Handayani Surabaya: pertama, belum semua masyarakat memperoleh layanan pendidikan. Khususnya warga negara (masyarakat) yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dan kedua, Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal, sehingga penyelenggara pendidikan inklusif ini belum berkembang baik.

Perlu diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan proses pembelajaran di Sekolah Galuh Handayani Surabaya sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusif di institusi tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan para implementor yang mampu dan mau melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif tersebut, sedangkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, yakni: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Bila empat faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh para implementor, diharapkan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara dengan tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Galuh Handayani Surabaya?
- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam mewujudkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Galuh Handayani Surabaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung suatu data yang makna. Adapun fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Mengamati perilaku implementor dari institusi pendidikan Pemerintah Kota, institusi sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan inklusif.
- b. Mengamati pelaksanaan program kerja dari para guru dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya.
- c. Mengamati pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan inklusif.
- d. Mengamati pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengelolaan pendidikan inklusif.

Selanjutnya analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif.

HASIL TEMUAN PENELITIAN:

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Galuh Handayani Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan yang meliputi aparat birokrasi pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ada di sekolah Galuh Handayani Surabaya belum

sepenuhnya optimal sesuai harapan masyarakat. Ini disebabkan para implementor dari aparat birokrasi pendidikan kelihatannya kurang mampu menjabarkan isi kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pernyataan tersebut di atas telah menunjukkan kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif.

Hasil penelitian di atas di dukung oleh Penelitian Sunardi (2009) yang mengatakan terhadap 12 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support sistem. Salah satu bagian penting dari support sistem adalah tentang penyiapan anak.

Senada dengan penelitian di atas hasil penelitian ini diperkuat penelitian Juang Sunanto, dkk (2010) mengatakan bahwa jumlah ABK di SD inklusif dalam satu kelas bervariasi dari 1 sampai 4 anak. Sedangkan jumlah siswa keseluruhan di dalam satu kelas antara 20 sampai 46 anak. Pada umumnya kelas yang terdapat siswa ABK memiliki lebih dari satu guru. (2) Rata-rata indeks inklusi sebesar 38,58 dengan indeks inklusi ideal 54. (3) Indeks inklusi tinggi dicapai di kelas yang memiliki guru lebih dari satu, sering mengikuti pelatihan penanganan ABK, siswa ABK lebih banyak, dan jumlah siswa keseluruhan lebih sedikit.

Ini menunjukkan kurangnya kemampuan dalam menjabarkan isi kebijakan berpengaruh pada saat memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pendidikan inklusif menjadi

kabur dan kurang jelas dan akibatnya para implementor sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah menjadi kurang berpijak pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal Implementasi pendidikan inklusif saat ini merupakan awal dari proses panjang menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Upaya sosialisasi program inklusi merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang kemudian dibentuknya tim sosialisasi inklusif dengan peranan dari kepala sekolah, staf, komite dan guru, oleh karena itu perlu pengkajian yang lebih mendalam agar sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi lebih optimal.

Proses pembelajaran di sekolah Galuh Handayani Surabaya belum sepenuhnya menunjukkan karakteristik proses pembelajaran yang inklusif, hal ini dapat terlihat belum semuanya guru di sekolah pendidikan inklusif menggunakan kurikulum bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dengan demikian guru belum sepenuhnya memberikan layanan maksimal terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem dukungan bagi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berfungsi maksimal, hal ini disebabkan karena komponen-komponen sistem dukungan yang ada belum dapat menunjukkan peran yang jelas.

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sikap siswa agar selalu menghargai orang lain, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok berbeda. Dengan demikian, agar peran guru berfungsi secara maksimal, maka diperlukan langkah-langkah berikut ini. *Pertama*, guru harus memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti diskriminatif terhadap difabel. Dengan wawasan dan pemahaman yang cukup, maka guru dapat diharapkan sebagai motor penggerak utama yang akan membangun kesadaran siswa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap mereka, para difabel dan terhadap mereka yang normal. *Kedua*, guru sebagai penggerak utama untuk kesadaran siswa agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap difabel diharapkan mampu mempraktekkan wacana anti diskriminasinya secara langsung di dalam dan di

luar kelas, termasuk juga di luar sekolah. Dengan melakukan praktek secara langsung dihadapan siswa, maka diharapkan siswa akan mencontoh dan juga menerapkan sikap yang sama dalam kehidupan mereka di masyarakat. *Ketiga*, guru seharusnya memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap difabel, terutama ketika melihat adanya diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan kemampuan ini.

Selain peran sentral yang dimainkan oleh guru dalam menanamkan sikap anti diskriminasi terhadap difabel, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mendukung hal tersebut, agar menjadi sekolah inklusif, *pertama*, adalah adanya undang-undang atau peraturan sekolah yang menekankan dan menyatakan bahwa sekolah menerima siswa normal dan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, dan sekolah juga menjamin siswa yang normal maupun yang difabel untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal paling substansial adalah peraturan tersebut adalah melarang tindakan diskriminasi terhadap siswa yang normal maupun terhadap mereka yang difabel.

Kedua, sekolah harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan-pelayanan khusus bagi kelompok difabel. Seperti guru harus mempunyai keterampilan khusus untuk menangani siswa yang difabel. Kemudian menyediakan fasilitas khusus, seperti tempat duduk khusus, tempat parkir khusus, jalan khusus dan fasilitas belajar dan sarana pendukung lainnya, yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas belajar mereka.

Ketiga, sekolah sebaiknya menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang normal dan difabel. Kurikulum ini substansinya tidak hanya menekankan bagaimana membuat para siswa mudah memahami mata pelajaran yang diajarkan. Akan tetapi juga bertujuan bagaimana agar para siswa, baik yang normal maupun yang difabel, dapat saling memahami, menghormati, dan menghargai satu sama lain. *Keempat*, sekolah memberikan pelatihan kepada para guru maupun para staf atau para *stakeholder* di sekolah, tentang bagaimana cara bersikap dan cara menghadapi siswa difabel dan siswa yang

normal di sekolah secara santun dan manusiawi.

Implementasi pendidikan inklusif memerlukan kefleksibelan pengelolaan dan bekerja tim untuk mencapai keberhasilan siswa. Telaah konseptual tersebut di atas memberikan gambaran bahwa: *pertama*, pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus pada semua level dan jenjang pendidikan. *Kedua*, dalam sekolah inklusif menerapkan model multiinput artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. *Ketiga*, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak.

Selanjutnya aspek-aspek penting dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan sekolah inklusif adalah (1) Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Peningkatan kemampuan ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti: pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi/menggali sumber lain, kemudian mempraktekkannya di dalam kelas. (2) semua anak memiliki hak untuk belajar, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani semua pemerintah di dunia. (3) Guru menghargai semua anak di kelas, guru berdialog dengan siswanya; guru mendorong terjadinya interaksi di antara anak-anak; guru mengupayakan agar sekolah menjadi menyenangkan; guru mempertimbangkan keragaman di kelasnya; guru menyiapkan tugas yang disesuaikan untuk anak; guru mendorong terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak. (4) Dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja dan bermain bersama. Mereka yakin, bahwa pendidikannya

hendaknya inklusif, adil dan tidak diskriminatif, sensitif terhadap semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. (5) Lingkungan pembelajaran yang inklusif mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, supaya peserta didik dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk melindungi diri dari penyakit dan bahaya. Selain itu, tidak ada kekerasan terhadap anak, pemukulan atau hukuman fisik.

Realitanya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (input–proses–output) sampai dengan *outcome* atau dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan merupakan sasaran utama, oleh karena itu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan para pejabat bawahan (*implementor*) sangat berperan serta dalam hal ini. Disamping itu konsensus tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan tanggung jawab implementor dalam membangun organisasi sebagai wadah menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat semakin terwujud.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh kondisi sosial-emosi, dan/atau kondisi ekonomi, dan/atau kondisi politik, dan/atau kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian. Dengan kata lain, kita tidak hanya membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kelainan/kecacatan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang sekolah. Oleh karena itu sekolah hendaknya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Mengubah sekolah atau kelas tradisional menjadi inklusif, ramah terhadap pembelajaran merupakan suatu proses dan bukan suatu kejadian tiba-tiba. Untuk itu diperlukan suatu program kerja. Program yang dilaksanakan oleh sekolah Galuh Handayani Surabaya meliputi: (a) program kompetensi Guru; (b)

program layanan pembelajaran, dan (c) program layanan khusus.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam mewujudkan Mutu Pendidikan pada Sekolah Galuh Handayani Surabaya

Dari hasil penelitian didapat dari jawaban informan, Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Galuh Handayani masih belum memuaskan sesuai harapan intitusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif perlu dicari solusi yang tepat dan cepat. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus mampu mengkaitkan antara tujuan yang dirumuskan dan realisasi atau hasil yang akan dan atau telah dilakukan, agar ada sinkronisasi. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Menurut pendekatan model Edwards III (1988), ada empat faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan ataupun kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Keempat faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menghambat hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Seperti halnya para implementor dari Dinas Pendidikan dalam satu semester hanya memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan inklusif di Sekolah Galuh Handayani Surabaya hanya dua kali dalam satu semester. Ini menunjukkan bahwa frekuensi sosialisasinya relatif sedikit. Padahal sosialisasi ini sangat penting bagi Sekolah, karena dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah inklusif cara penanganan sangat unik.

Keunikan ini dikarenakan siswa yang ada di sekolah Galuh Handayani mempunyai karakteristik yang beragam, baik sikap, daya berfikir, dan perilaku siswa.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di sekolah Galuh Handayani Surabaya, realitanya sosialisasi yang diberikan oleh para implementor aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya sering terlambat, dan kurang dipahami oleh para guru maupun tenaga kependidikan, cara penyampaian kurang jelas. Padahal guru merupakan ujung tombak dalam pelayanan pendidikan, kalau guru kurang memahami apa yang disampaikan oleh para implementor, maka dalam melaksanakan proses pembelajaran terhadap anak yang berkebutuhan khusus kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya disajikan data tentang sosial aparat Dinas Pendidikan Kota, Pertemuan guru dan pertemuan dengan wali murid.

Tabel 1
Sosialisasi Aparat Dinas Pendidikan

Klasifikasi Sosialisasi	Informan	%
Mudah dipahami	1	12,50
Cukup dipahami	3	37,50
Sulit dipahami	4	50
Total	8	100

Sumber: Hasil Wawancara, 2012

2. Sumber daya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Dilihat dari aspek dana, Sekolah Galuh Handayani sebenarnya dalam proses pengembangan pendidikan masih membutuhkan dana untuk pengembangan penambahan kelas, dilihat as-

pek sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran masih kurang. Dilihat aspek sumber daya manusia belum semua guru-guru memiliki kemampuan pendidikan inklusif. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Untuk mendukung implementasi kebijakan inklusif Sekolah Galuh Handayani Surabaya mengirim para guru-guru mengikuti pelatihan, dan seminar-seminar/workshop. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sekolah Galuh Handayani Surabaya berusaha membantu para guru untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2. Pelatihan para Guru

Tahun	Jumlah Guru Yang Mengikuti	Tema	Penyelenggara
2009	4	Pelatihan <i>Living Values Educational Program</i> .	Ikatan Psikologi perkembangan Indonesia.
	2	Perkembangan Anak	Universitas Widya Mandala.
	2	Penyusunan Pedoman Pendidikan Inklusif	Direktorat PSLB Dikdasmen Kemendiknas Jakarta
2010	2	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan Inklusif	Direktorat PPK-LK Dikdas Kemendikbud Jakarta
2011	2	Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Inklusif	Dinas Propinsi Jawa Timur
	2	Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi Berbasis Sumber Gizi Bagi Anak ABK	Direktorat PPK-LK Dikdas Kemendikbud Jakarta
2012	2	Pengembangan Draf Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif	Direktorat PPK-LK Dikdas Kemendikbud Jakarta

Sumber: Sekolah Galuh Handayani, 2012

3. Disposisi

Keberhasilan pendidikan inklusif tidak terlepas dari elemen-elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat diimplementasikan. Elemen-elemen dasar tersebut antara lain: sikap kepala sekolah, guru yang positif terhadap keanekaragaman siswa. Elemen yang terpenting dalam pendidikan inklusif adalah sikap guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sikap guru tidak hanya berpengaruh setting kelas tetapi juga dalam pemilihan strategis pembelajaran, perilaku prososial, yang dimaksud dengan perilaku prososial adalah adanya guru yang melakukan bantuan atau pertolongan kepada siswa tanpa pamrih, dan juga memberikan

dorongan pada siswa untuk lebih meningkatkan dalam belajar agar dapat meningkatkan prestasi akademik dan sosial. Pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pada prestasi akademik saja, tetapi juga kompetensi sosial.

Kecenderungan sikap perilaku implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh insentif yang diterimanya. Insentif menekankan tingkat kecukupan hadiah (*reward*) yang akan diterima implementor kebijakan bila bersedia atau berhasil dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana atau instrumen pengawasan bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Untuk lebih jelasnya disajikan data hasil wawancara dengan para informan mengenai sikap dari para guru dalam melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Data tentang sikap guru

Kreteria Sikap Guru	Informan	%
Semua Guru mempunyai sikap positif dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif	8	100
Kadang-kadang mendukung implementasi pendidikan inklusif	0	0
Tidak mendukung implementasi pendidikan inklusif	0	0
Total	8	100

Sumber: Hasil Wawancara, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa semua guru yang ada di sekolah Galuh Handayani Surabaya mempunyai sikap positif terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Sikap positif ini akan mampu menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah dan pada gilirannya akan mampu mengefektifkan pelaksanaan proses pembelajaran.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting disamping faktor-faktor komunikasi, sumber daya, dan perilaku pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP memberi arah pada pelaksana atau implementor dalam hal pemanfaatan waktu,

tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. SOP juga memberi ruang pada pelaksana dalam suatu organisasi bila terjadi mutasi atau perpindahan pegawai ke posisi lain. SOP memberi pijakan yang jelas pada pegawai agar dalam melaksanakan aktivitas barunya tidak mencari-cari bagaimana cara mengerjakan sesuatu, kepada siapa dan apa isi yang dituntut dalam pekerjaannya, oleh karena itu untuk menunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusif diperlukan standar operasional prosedur. Untuk lebih jelasnya disajikan data penggunaan standar operasional prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Klasifikasi Sosialisasi	Informan	%
Menggunakan SOP	6	75
Kadang-Kadang menggunakan SOP	2	25
Tidak menggunakan SOP	0	0
Total	8	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan inklusif di sekolah Galuh Handayani dikatakan baik, karena hampir sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh institusi sekolah Galuh Handayani Surabaya.

KESIMPULAN

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah Galuh Handayani belum optimal atau masih belum sesuai harapan masyarakat. Ini disebabkan karena aktor implementor kurang mampu menjabarkan isi kebijakan dan kurang memahami bagaimana mensosialisasikan di sekolah-sekolah, akibatnya kepala sekolah dan para guru beserta tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran sekolah kurang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Sekolah Galuh Handayani setempat. Disamping itu implementor belum memahami sepenuhnya tentang pendidikan inklusif, oleh karena itu dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan inklusif implementor menjadi bias kurang mencapai sasaran.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Galuh Handayani Surabaya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Realitanya faktor-faktor tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh para implementor dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ini tercermin implementor dari Dinas Pendidikan jarang sekali memberikan sosialisasi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya, pemberian dana pendidikan relatif rendah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, mengenai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru institusi sekolah harus membayar biaya pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Abdullah, 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Bandi Delphie, 2006, *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bogdan R.C. dan Biklen SK., 1982, *Qualitative Educational Research Qualitative, An Introduction To Teory and Method*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis keArah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications

- Daniel P. Hallahan dkk., 2009, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc.
- David Smith, 2006, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008,
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (Penyunting), 2001. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*, Yogyakarta: Hanindita.
- , 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press. Departemen Pendidikan Nasional.
- Iwa Kuntadi. 2007. *Profesionalisme Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Era Teknologi Informasi*.
- Milles & Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, Jakarta: UI-Press.
- Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, dalam Adinistration and Society*, London: Sage.
- Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Sunardi. 1995. *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar iasa*. Dikti. Depdikbud. Jakarta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2008. *Arah Baru Pendidikan*, Harian Kompas, edisi 9 Juni 2008
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- UNESCO. 1997. *Training of Teacher/Trainers in Technical and Vocational Education* Section for Technical and Vocational Education.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.